

Analisis Implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDES di Desa Labulu Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna: Perspektif Administrasi Publik

Harpiang Wardiningsih¹, Sitti Hadijah², Wa Ode Sartika

¹Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Manajemen dan Bisnis, Universitas Karya
Persada Muna, Raha, Indonesia

Email: phiansungkusara11@gmail.com

²Program Studi D3 Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Vokasi, Universitas Karya
Persada Muna, Raha, Indonesia

Email: shadijah.lc.id@gmail.com

³Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Manajemen dan Bisnis, Universitas Karya
Persada Muna, Raha, Indonesia

Email: waodesartika.ukpm@gmail.com

Abstrak

Program pengembangan desa mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, BUMDes di berbagai desa masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan desa mandiri melalui BUMDes di Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, ditinjau dari perspektif administrasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis dengan mengaitkan temuan empiris pada peraturan perundang-undangan dan teori implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BUMDes di Desa Labulu-bulu telah berjalan sesuai regulasi, namun belum optimal dalam mewujudkan kemandirian desa. Kendala utama terletak pada aspek komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi dan pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan perbaikan mekanisme implementasi kebijakan diperlukan agar BUMDes dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pengembangan desa mandiri.

Kata Kunci: BUMDes, Desa Mandiri, Implementasi Kebijakan, Administrasi Publik, Pembangunan Desa

Abstract

The village self-reliance development program through Village-Owned Enterprises (BUMDes) is a strategic government policy aimed at promoting village economic independence and improving community welfare. However, in its implementation, many villages still face various challenges

in optimizing the role of BUMDes. This study aims to analyze the implementation of the village self-reliance development program through BUMDes in Labulu-bulu Village, Parigi District, Muna Regency, from a public administration perspective. This research employed an empirical juridical approach using field research methods. Data were collected through interviews and document analysis and were analyzed descriptively and analytically by linking empirical findings with relevant regulations and policy implementation theories. The results indicate that the implementation of BUMDes in Labulu-bulu Village has complied with existing regulations but has not yet been optimal in achieving village self-reliance. The main constraints include weak policy communication, limited resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure and supervision. This study concludes that strengthening governance, improving human resource capacity, and enhancing policy implementation mechanisms are essential for optimizing the role of BUMDes as an instrument for sustainable village development.

Keywords: BUMDes, Village Self-Reliance, Policy Implementation, Public Administration, Village Development

1. Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan elemen strategis dalam pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkecil kesenjangan antara wilayah desa dan perkotaan. Dalam kerangka pembangunan saat ini, desa tidak lagi dipandang sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan untuk mengelola potensi dan sumber daya secara mandiri. Ketentuan tersebut ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Instrumen kebijakan yang dirancang untuk mendorong kemandirian desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi desa yang dikelola secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan memperkuat perekonomian desa. Pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan serta potensi lokal yang dimiliki desa. Keberadaan BUMDes berperan penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi, karena mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, BUMDes berfungsi sebagai sarana dalam menjalankan berbagai bentuk usaha desa yang produktif. Pada dasarnya, tujuan utama pembentukan BUMDes adalah untuk mewadahi dan mengembangkan seluruh kegiatan usaha desa guna meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa (Safitri, et al. 2021).

BUMDes dibentuk sebagai lembaga ekonomi desa yang berfungsi mengelola potensi lokal, meningkatkan pendapatan asli desa, membuka lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian masyarakat desa (Kementerian Desa PDTT, 2020). Melalui BUMDes, desa diharapkan mampu mengembangkan unit-unit usaha produktif yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi program pengembangan desa mandiri melalui BUMDes belum sepenuhnya berjalan optimal di berbagai daerah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa banyak BUMDes menghadapi permasalahan seperti lemahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya dukungan kebijakan dari pemerintah desa (Putra & Pratiwi, 2019; Rahmawati, 2021). Kondisi ini menyebabkan BUMDes belum mampu berfungsi secara maksimal sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Desa Labulu-bulu yang berada di Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, merupakan salah satu desa yang telah melaksanakan program pengembangan desa mandiri melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Walaupun BUMDes telah terbentuk dan mengelolah sejumlah kegiatan usaha, perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemandirian desa masih belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan BUMDes, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan di tingkat desa.

Perspektif administrasi publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada perumusan kebijakan, tetapi juga sangat ditentukan oleh efektivitas proses implementasinya. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat elemen utama, yakni komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap atau disposisi para pelaksana, serta struktur birokrasi. Ketidakefektifan salah satu elemen tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan kajian tentang pelaksanaan program pengembangan desa mandiri melalui BUMDes di Desa Labulu-bulu dari sudut pandang administrasi publik. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap faktor-faktor yang berperan sebagai penghambat maupun pendukung implementasi kebijakan BUMDes, sekaligus memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah desa dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan kemandirian desa yang berkelanjutan.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam konteks pembangunan desa dan administrasi publik terus mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Fokus utama penelitian mencakup implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas manajemen, serta kontribusi BUMDes terhadap pembangunan ekonomi desa. Menurut Meliana et al. (2025), analisis implementasi kebijakan BUMDes di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh dimensi komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi variabel yang juga menjadi kerangka teori administrasi publik dalam penelitian ini.

Keberadaan BUMDes secara signifikan berkontribusi terhadap nilai Indeks Pembangunan Desa (IDM), dimana desa yang memiliki BUMDes cenderung lebih maju dibanding desa tanpa BUMDes, yang mengindikasikan peran penting BUMDes dalam pembangunan sosial dan ekonomi desa (Ultari dan Khoirunurrofik, 2024). Implementasi program BUMDes juga diteliti di Sidoarjo, dimana Naini dan Mursyidah (2024) menganalisis pelaksanaan program BUMDes di Desa Sidomojo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BUMDes berjalan dengan beberapa kegiatan usaha namun menghadapi kendala operasional seperti keterbatasan modal dan partisipasi masyarakat.

Implementasi program BUMDes “Berkah Bersama” di Kabupaten Tabalong dari aspek sumber daya, menekankan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi penghambat utama dalam mengoptimalkan pelaksanaan BUMDes (Akhmalia dan Subadi, 2023). Penelitian oleh Syavitri dan Istiqomah (2024) di Desa Wangkelang mengevaluasi efektivitas pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan hasil bahwa meskipun BUMDes mampu memberikan kontribusi positif, terdapat tantangan dalam integrasi tujuan, adaptasi, dan pencapaian target kesejahteraan masyarakat.

Kurniati et al. (2024) meneliti peran BUMDes Manekan dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kupang, menegaskan bahwa BUMDes bukan hanya institusi ekonomi tetapi juga instrumen pemberdayaan sosial yang membantu masyarakat lokal mendapatkan akses terhadap peluang ekonomi. Strategi implementasi BUMDes dari perspektif inklusi sosial juga diteliti oleh Wulandari et al. (2024), yang menunjukkan

pentingnya pendekatan inklusif dalam perencanaan dan pelaksanaan BUMDes untuk menjangkau kelompok marjinal termasuk penyandang disabilitas.

Studi yang dilakukan oleh Sastika dan Mayasiana (2024) membahas strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi melalui program BUMDes, menekankan bahwa strategi yang matang diperlukan untuk mengidentifikasi potensi lokal dan mengatasi hambatan implementasi. Pada tingkat lain, Hariyoko (2023) melakukan kajian pola pengelolaan BUMDes di Tuban dan menemukan bahwa pola manajemen yang efektif terkait erat dengan pencapaian tujuan ekonomi desa serta partisipasi komunitas setempat. Sebuah kajian tentang akuntabilitas BUMDes Tirta Mandiri menyoroti peran transparansi dan tata kelola digital sebagai aspek penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, membuka ruang diskusi mengenai inovasi administrasi publik dalam konteks BUMDes.

Kajian komprehensif yang menggabungkan aspek penyaluran Dana Desa dalam pengelolaan BUMDes di dua desa di Malang oleh Noviana et al. (2024) menandai adanya variasi kondisi implementasi tergantung pada konteks lokal dan prosedur penyaluran dana, sehingga kompleksitas implementasi kebijakan BUMDes tidak bisa dilepaskan dari dinamika administrasi dana desa. Sejumlah penelitian telah mengungkap berbagai aspek implementasi BUMDes, termasuk pemberdayaan masyarakat, efektivitas pengelolaan, strategi pemerintah desa, dan kontribusi terhadap pembangunan desa. Namun, terlihat kesenjangan penelitian sebagai berikut:

1. Sedikitnya penelitian yang secara eksplisit menggunakan kerangka administrasi publik (teori implementasi kebijakan) untuk mengkaji BUMDes, terutama di konteks wilayah timur Indonesia seperti Kabupaten Muna.
2. Banyak penelitian bersifat deskriptif dan lebih menekankan aspek ekonomi atau manajemen tanpa keterkaitan yang kuat dengan teori implementasi kebijakan publik.
3. Belum banyak studi yang mengintegrasikan variabel komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi secara komprehensif dalam konteks implementasi BUMDes pada satu lokasi tertentu.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengadopsi perspektif administrasi publik secara holistik, menggunakan kerangka teori Edward III untuk

menilai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pengembangan desa mandiri melalui BUMDes di Desa Labulu-bulu.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menelaah implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam pelaksanaan program pengembangan desa mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengembangan desa mandiri melalui BUMDes diimplementasikan di Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah. Perspektif administrasi publik digunakan untuk mengkaji proses implementasi kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan. Responden penelitian terdiri dari pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat Desa Labulu-bulu yang terlibat atau terdampak langsung oleh pengelolaan BUMDes. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi desa, laporan kegiatan dan keuangan BUMDes, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan mendalam kondisi implementasi program pengembangan desa mandiri melalui BUMDes di Desa Labulu-bulu. Analisis dilakukan dengan mengkorelasikan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori-teori administrasi publik dan implementasi kebijakan yang relevan, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan BUMDes dalam mewujudkan desa mandiri.

Lokasi penelitian dipilih secara purposive di Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut telah membentuk dan

menjalankan BUMDes sebagai instrumen pengembangan desa mandiri. Pemilihan satu lokasi penelitian dimaksudkan untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap implementasi kebijakan di tingkat desa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pengurus BUMDes, pemerintah desa, serta pihak terkait lainnya guna memperoleh informasi yang akurat dan mendalam mengenai proses pengelolaan dan implementasi program BUMDes. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen tertulis dan visual yang mendukung analisis penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Implementasi Program Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes di Desa Labulu-bulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengembangan desa mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Labulu-bulu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Pemerintah desa telah membentuk struktur organisasi BUMDes serta menetapkan jenis usaha yang disesuaikan dengan potensi lokal desa. Namun demikian, implementasi program tersebut belum sepenuhnya optimal dalam mendorong kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes di Desa Labulu-bulu telah menjalankan beberapa unit usaha yang berorientasi pada pemanfaatan potensi wilayah, tetapi kontribusi ekonomi yang dihasilkan masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes secara kelembagaan telah terpenuhi, namun efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala administratif dan manajerial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa banyak BUMDes telah terbentuk secara administratif, tetapi belum mampu berfungsi optimal sebagai penggerak ekonomi desa akibat lemahnya implementasi kebijakan di tingkat desa.

Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes di Desa Labulu-bulu masih relatif rendah. Partisipasi masyarakat sebagian besar masih terbatas pada pemanfaatan layanan usaha yang disediakan BUMDes, sementara keterlibatan dalam perencanaan, pengambilan

keputusan, dan pengawasan belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap BUMDes, sehingga pengembangan usaha cenderung berjalan stagnan.

4.2 Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Perspektif Administrasi Publik

4.2.1 Aspek Komunikasi Kebijakan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan terkait program BUMDes di Desa Labulu-bulu belum berjalan secara maksimal. Sosialisasi mengenai tujuan, mekanisme, dan manfaat BUMDes kepada masyarakat masih terbatas dan bersifat formal. Akibatnya, sebagian masyarakat belum memahami peran dan fungsi BUMDes secara menyeluruh, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan BUMDes masih rendah. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Syavitri dan Istiqomah (2024) yang menyimpulkan bahwa lemahnya komunikasi kebijakan menjadi salah satu penyebab rendahnya keterlibatan masyarakat dalam program BUMDes. Komunikasi yang tidak efektif berdampak pada rendahnya kepercayaan dan partisipasi publik terhadap program desa.

Lemahnya komunikasi kebijakan juga tercermin dari belum optimalnya penyampaian informasi secara dua arah antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat. Proses komunikasi cenderung bersifat top-down dan belum membuka ruang dialog yang memadai bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun masukan terkait pengelolaan BUMDes. Kondisi ini menyebabkan kebijakan BUMDes dipersepsikan sebagai program pemerintah desa semata, bukan sebagai usaha bersama milik masyarakat desa. Hal ini didukung oleh penelitian Ritonga, dkk (2024) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes di Desa Pulau Rakyat Tua menemui tantangan seperti keterbatasan SDM dan rendahnya literasi masyarakat, yang berdampak pada pelaksanaan program usaha.

4.2.2 Aspek Sumber Daya

Dari aspek sumber daya, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pengelolaan BUMDes di Desa Labulu-bulu. Pengurus BUMDes sebagian besar belum memiliki kemampuan manajerial dan kewirausahaan yang memadai. Selain itu, keterbatasan modal usaha dan sarana pendukung turut menghambat pengembangan unit usaha BUMDes. Hasil ini sejalan

dengan penelitian Akhmalia dan Subadi (2023) yang menemukan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan modal menjadi faktor dominan yang menghambat optimalisasi kinerja BUMDes. Penelitian Ultari dan Khoirunurrofik (2024) juga menegaskan bahwa kualitas sumber daya merupakan penentu utama keberhasilan BUMDes dalam mendukung pembangunan desa.

4.2.3 Aspek Disposisi Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Labulu-bulu menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah desa dan pengurus BUMDes untuk mengembangkan usaha desa. Namun, komitmen tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan inovasi dan kemampuan pengambilan keputusan yang strategis. Hal ini berdampak pada lambannya pengembangan unit usaha dan kurangnya diversifikasi kegiatan ekonomi BUMDes. Hasil ini sesuai dengan temuan Hariyoko (2023) yang menyatakan bahwa sikap dan komitmen pelaksana kebijakan harus disertai dengan kapasitas manajerial agar BUMDes dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap kehati-hatian yang berlebihan dari pengelola BUMDes dalam mengambil keputusan usaha turut memengaruhi kinerja BUMDes. Pengurus cenderung menghindari risiko sehingga inovasi dan pengembangan usaha baru belum menjadi prioritas utama. Kondisi ini menyebabkan BUMDes berjalan secara normatif dan kurang adaptif terhadap peluang ekonomi lokal.

4.2.4 Aspek Struktur Birokrasi

Dari aspek struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas dan kewenangan dalam struktur organisasi BUMDes belum sepenuhnya berjalan efektif. Mekanisme pengawasan dan pelaporan masih lemah, sehingga akuntabilitas pengelolaan BUMDes belum optimal. Koordinasi antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes juga masih bersifat administratif dan belum strategis. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Naini dan Mursyidah (2024) yang menyebutkan bahwa struktur birokrasi yang belum tertata dengan baik menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan implementasi program BUMDes di tingkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi program pengembangan desa mandiri melalui BUMDes di Desa Labulu-bulu telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan kemandirian desa. Dari perspektif

administrasi publik, keempat variabel implementasi kebijakan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi masih memerlukan penguatan. Penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa permasalahan utama BUMDes bukan terletak pada aspek regulasi, melainkan pada implementasi kebijakan di tingkat lokal (Putra & Pratiwi, 2019; Rahmawati, 2021; Ultari & Khoirunurrofik, 2024). Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan partisipasi masyarakat, serta perbaikan tata kelola BUMDes menjadi faktor kunci dalam mewujudkan desa mandiri yang berkelanjutan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program pengembangan desa mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Labulu-bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Secara kelembagaan, BUMDes telah terbentuk dan menjalankan kegiatan usaha berbasis potensi lokal desa. Namun demikian, implementasi program tersebut belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif administrasi publik, masih terdapat kelemahan pada aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Sosialisasi kebijakan yang belum maksimal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya inovasi pengelolaan, serta lemahnya tata kelola dan mekanisme pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas BUMDes sebagai instrumen pengembangan desa mandiri.

5.2. Limitasi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu Desa Labulu-bulu, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk menggambarkan kondisi implementasi BUMDes di wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda. Kedua, data penelitian bersumber pada pendekatan kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi, sehingga sangat bergantung pada subjektivitas responden dan keterbukaan informasi yang diberikan. Ketiga, penelitian ini

belum mengukur secara kuantitatif dampak ekonomi BUMDes terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, ada beberapa saran yang diajukan yaitu pemerintah desa perlu memperkuat komunikasi kebijakan dan meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes agar pengelolaan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan lokasi dan menggunakan pendekatan metode campuran guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak BUMDes terhadap kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Karya Persada Muna yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Labulu-bulu, pengurus BUMDes, serta masyarakat Desa Labulu-bulu yang telah berpartisipasi dan memberikan informasi selama proses penelitian. Selain itu, penulis menghargai kontribusi semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Referensi

- Akhmalia, G. N., & Subadi, W. (2023). *Implementasi program BUMDes Berkah Bersama ditinjau dari aspek sumber daya* (JAPB).
- Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Hariyoko, Y. (2023). Pola pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 45–56.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Khmalia, G. N., & Subadi, W. (2023). Implementasi program BUMDes ditinjau dari aspek sumber daya. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 101–112.

- Kurniati, T. I. B., Raga Lay, M., & Therik, J. J. (2024). *Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat* (Jurnal Publik).
- Meliana, M., Kania, I., Akbar, G. G., & Ulumudin, A. (2025). *Policy implementation analysis of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in empowering the local economy in Garut Regency* (Ilomata International Journal of Social Science).
- Naini, K. K., & Mursyidah, L. (2024). *Implementasi program BUMDes di Desa Sidomojo, Kecamatan Krian* (Web of Scientist International Scientific Research Journal).
- Nurfaisal, M. D., et al. (2024). *Akuntabilitas program kemandirian desa berbasis smart village* (Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer).
- Putra, A., & Pratiwi, R. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan ekonomi desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 123–135.
- Rahmawati, L. (2021). Implementasi kebijakan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 45–58.
- Ritonga, M. A., Harahap, R. H., & Situmorang, T. P. (2025). *Implementasi kebijakan pemerintah desa terhadap pengelolaan BUMDes di Desa Pulau Rakyat Tua Tahun 2022–2023. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 8(1), 1 <https://doi.org/10.34007/jehss.v8i1.2716>
- Syavitri, A. A., & Istiqomah, I. (2024). *Efektivitas pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wangkelang* (Journal of Community Development and Disaster Management).
- Safitri, I., et al. (2021) Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Bumg) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 5(2), 39-47.
- Ultari, T., & Khoirunurrofik, K. (2024). *The role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in village development: Empirical evidence from villages in Indonesia* (Jurnal Perencanaan Pembangunan).
- Wulandari, K., et al. (2024). *Strategi implementasi BUMDes dalam perspektif inklusi sosial* (Jurnal ENTITAS SOSIOLOGI).